

**STATUS DAN PELAKSANAAN PEMERINTAHAN  
YOGYAKARTA DENGAN KEISTIMEWAANYA,  
DALAM PERSPEKTIF ISLAM**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STARA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh

WARDATUZHRO

NIM : 00370136.

DI BAWAH BIMBINGAN:

1. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M. Hum.
2. FATMA AMALIA, S. Ag. M. Si.

**JINAYAH SIYASAH FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

2005

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul

“STATUS DAN PELAKSANAAN PEMERINTAHAN YOGYAKARTA  
DENGAN KEISTIMEWAANYA DALAM PERSPEKTIF ISLAM”

Yang disusun oleh:

WARDATUZHARO

NIM: 00370136

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 29 Januari 2005. Dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 28 Dzulhijjah 1425 H  
8 Februari 2005 M



Panitia Ujian Munaqasyah.

Ketua Sidang

Dr. Ainurrofiq M. Ag  
NIP: 150 289 213

Pembimbing I

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.  
NIP: 150 260 055

Penguji

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.  
NIP: 150 260 055

Sekretaris Sidang

Slamet Haryono SE, M. Si.  
NIP: 150 300994

Pembimbing II

Hj. Fatma Amalia, S. Ag, M. Si.  
NIP: 150 277 618

Penguji II

Udiyo Basuki, SH.  
NIP: 150 291 022

**Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta.

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudari Wardatuzahro

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan  
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Wardatuzahro

NIM : 00370136

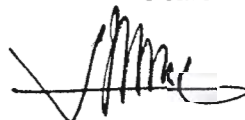
Judul : "Status dan Pelaksanaan Pemerintahan Yogyakarta dengan  
Keistimewaanya dalam Perspektif Islam (Studi Tentang Pasal 122 UU No 22  
Tahun 1999 )"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata  
satu dalam jurusan Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan ini  
kami berharap agar skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk  
itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 11 Dzulqa'dah 1425.  
22 Desember 2004.

Pembimbing I



Drs. Makhrus Munajat, M.Hum.  
NIP. 150 260055.

**Fatma Amalia, S. Ag. M.Si.**

Dosen Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta.

Nota Dinas

Hal : Skripsi  
Saudari Wardatuzahra

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Wardatuzahro

NIM : 00370136

Judul : " Status dan Pelaksanaan Pemerintahan Yogyakarta dengan Keistimewaanya dalam Perspektif Islam (Studi Tentang Pasal 122 UU No 22 Tahun 1999)"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Jinayah Siyasah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 11 Dzulqa'dah 1425.  
22 Desember 2004.

Pembimbing II



Fatma Amalia, S. Ag. M.Si.  
NIP. 150 277618.

## PERSEMBAHAN



Teruntuk ibu dan bapak yang telah menyanggiku terima kasih atas kepercayaan, semua keluarga. untuk baby terimakasih atas pengertiannya, tidak akan lupa untuk kawan-kawanku terimakasih atas perjuangan untuk Indonesia.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣād	s	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	`	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi

ك	kāf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعقدین عدة	ditulis ditulis	muta' aqqidīn 'iddah
----------------	--------------------	-------------------------

### C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة جزية	ditulis ditulis	hībbah jizyah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandang 'al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	ditulis	karāmah al-auliyyā'
----------------	---------	---------------------

- b. Bila ta` marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	zakātul fiṭri
------------	---------	---------------

#### D. Vokal Pendek

—	kasrah	ditulis	i
—	fathah	ditulis	a
—	dammah	ditulis	u

#### E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	ā yas'ā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaulun



**G. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof**

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدْتِ	ditulis	u'iddat
لَنْنُ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

**H. Kata Sandang Alif + Lam**

a. Bila diikuti Huruf Qamariyyah

الْقُرْآنُ	ditulis	al-Qur' ān
الْقِيَاسُ	ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf / (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	as-Samā'
الشَّمْسُ	ditulis	asy-Syams

**I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	zawī al-furūd
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	ahl as-sunnah

## Motto



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

*Kehidupan Hari kemarin adalah pelajaran,  
Kehidupan hari esok adalah perjuangan.*

## ABSTRAK

Skripsi ini merupakan upaya ilmiah dan akademis yang membongkar keistimewaan Yogyakarta. Sebagai topik utama dalam skripsi ini adalah tentang status dan pelaksanaan pemerintah Yogyakarta. Status keistimewaan yang diperoleh karena di Yogyakarta terdapat dua kekuasaan Kerajaan (kekuasaan tradisional), yaitu Kasultanan dan Paku Alaman. Masih eksisnya kedua kerajaan tersebut sehingga memberikan wacana baru tentang pelaksanaan pemerintahan Yogyakarta.

Implikasi dari keistimewaan membawa keterlibatan secara langsung kedua kerajaan dalam pemerintahan daerah, Dwi-tunggal kepemimpinan dalam satu daerah, yaitu selain sebagai raja maka mereka juga menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pasal 122 UU no 22 Tahun 1999 adalah salah satu dasar kuat dari pemerintahan Yogyakarta. Karena adanya UU ini melegalkan pemerintahan Yogyakarta yang diistimewakan oleh RI. Fenomena kepemimpinan di Yogyakarta menjadi sangat menarik ketika pemerintahan yang bersifat tradisional tetap eksis didalamnya.

Demokrasi yang menjadi sorotan utama dalam praktik politik pada akhir-akhir ini tidak tampak dalam pemerintahan Yogyakarta, ini dapat terlihat dalam pemilihan Gubernur dan Wagub. Dari mulai terbentuknya pemerintahan Yogyakarta, kepemimpinan selalu dipegang oleh keluarga dari Keraton dan Paku Alaman. Sehingga melahirkan pemikiran-pemikiran baru tentang praktik politik. Para intelektual, LSM dan kalangan aktivis mahasiswa mempertanyakan banyak hal tentang keistimewaan dalam kehidupan berdemokrasi.

Proses demokratisasi adalah tujuan utama dalam membedah keistimewaan Yogyakarta, pasca teretusnya reformasi sekaligus membawa lahirnya demokrasi dan identitas lokal, sehingga tercipta UU No 22 Tahun 1999 sebagai trobosan baru bagi Indonesia, khususnya Yogyakarta yang secara istimewa tertera dalam Pasal 122 UU No 22 Tahun 1999. Dikarekan Yogyakarta sebagai pemerintah lanjutan dari kerajaan Islam Mataram, maka setidaknyalah pemerintahan yang berlangsung berlandaskan pada praktik politik yang pernah berkembang dan diajarkan oleh Nabi.

Dengan demikian, Ada dua peristiwa pemerintahan. Yaitu pemerintahan yang berlaku di Yogyakarta dengan pemerintahan pada masa Nabi dan Khulafa al-Rasyidin. dalam konsep pemerintahan yang dilakukan oleh Nabi dan Khulafa al-Rasyidin tergambar menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi. Dengan demikian bagaimana konsep pemerintahan Yogyakarta yang mempunyai dua bentuk pemerintahan dan sekaligus sebagai pemerintahan lanjutan dari kerajaan Islam Mataram.

Dikarenakan tidak sedikit sejarah yang dikupas dalam masalah ini. Maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis. Yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui latar belakang peristiwa. Dengan metode yang digunakan, maka nyatalah lahirnya keistimewaan Yogyakarta yang berakibat: pemerintahan dwi-tunggal dan kuatnya pemerintahan keraton yang ada di Yogyakarta.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبد ورسوله اللهم صل

وسلم على خاتم النبيين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى اله واصحابه

اجمعين, اما بعد :

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Dzat yang maha pengasih lagi Maha penyayang, karena karunia-Nyalah penulis senantiasa dalam lindungan dan rahmat-Nya, sehingga dapat menjalankan ambisi dan cita-cita sebagai upaya mewujudkan harapan-harapan terbaik dalam kehidupan di dunia agar bermanfaat di akherat kelak. Tidak lupa pula penulis ucapkan shalawat *allahumma shalli'ala ihi wa sallam*, yang akan selalu mengalir pada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan menuju hidup yang sebenarnya. Hanya berharap mendapat syafaatnya.

Semua yang awalnya menjadi angan-angan akhirnya tuntas juga, tugas yang cukup berat yang pada akhirnya berujung pada ketenteraman dan kedamaian dalam hati. Mesti mengalami proses yang paling panjang dan cukup melelehkan, penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi sebagai penghantar akhir studi sebagai sarjana tingkat satu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah, jurusan Jinayah Siyasah. Apa yang telah terwujud ini tentunya tidak terlepas dari berbagai hal yang melingkupi penulis. Pihak-pihak yang sangat mendukung, sehingga terwujudlah proses yang selama ini dijalani.

Maka dalam kesempatan ini, izinkanlah penulis dengan rendah hati penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada ;

1. Drs.H. Malik Madaniy, MA, sebagai Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan segenap pembantunya.

2. Bapak Drs. Makhrus Munajat M, Hum. selaku pembimbing I, yang begitu ikhlas membimbing penyusun, dan memberi masukan-masukan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Fatma Amalia, S.Ag.M.Si., selaku pembimbing II yang telah begitu baik memberikan bimbingan dan koreksi dalam skripsi ini.
4. Civitas akademika UIN Sunan Kalijaga, dan segenap TU Fakultas Syari'ah .
5. Kedua orang tuaku yang sangat menyayangiku. Terima kasih ibu (engkau begitu kuat). Terimakasih bapak ( engkau begitu sabar).
6. untuk kawan-kawan semua tetap berjuang.

Semoga karya ini bisa bermanfa'at. Saran dan kritik bagi pengembangan keilmuan sangat diharapkan.

Yogyakarta, 11 Dzulqa'dah 1425 H  
22 Desember 2004.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Penyusun  
  
Wardatuzahra

**DAFTAR ISI.**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTAK .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>

**BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan .....	11
D. Telaah Pustaka.....	12
E. Kerangka Teoritik.....	17
F. Metode Penelitian.....	21
G. Sistematika Pembahasan.....	23

**BAB II PEMERINTAHAN DALAM ISLAM.**

A.Konsep Islam tentang Pemerintahan.....	25
1. Masa Nabi Muhammad.....	26

2. Masa Khulafa Al- Rasyidin.....	33
3. Masa Pasca Khulafa Al- Rasyidin.....	45
B Sistem Politik Pemerintahan.....	48
1. Demokrasi.....	48
1.a . Demokrasi dalam Islam.....	54
2. Monarki.....	60
2.a. Monarki dalam Islam .....	62

### **BAB III: Tentang Daerah Istimewa Yogyakarta.**

A. Sejarah Lahirnya DIY Menuju Keistimewaan.....	64
1. Masa Pra Kemerdekaan.....	65
2. Masa Pasca Kemerdekaan.....	68
B. Status Keistimewaan DIY.....	72
C. Pelaksanaan Politik Pemerintahan di DIY.....	90
1. Masa Kependudukan Belanda.....	90
2. Masa Kependudukan Jepang.....	94
3. Masa Revolusi dan Pasca Revolusi 1945.....	96
4. Masa Reformasi 1998.....	102

### **BAB IV: STATUS PEMERINTAHAN DIY DALAM PERSPEKTIF PEMERINTAHAN ISLAM.**

A. Status Keistimewaan Yogyakarta.....	110
1. NKRI (HB IX).....	110
2. Maklumat Sidang Rakyat Yogyakarta.....	111

B. Pemerintahan DIY dengan Pemerintahan Islam.....	114
1. Demokrasi.....	116
2. Monarki.....	123

**BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	129
B. Saran-saran.....	130

**DAFTAR PUSTAKA..... 131**

**LAMPIRAN- LAMPIRAN**

A. Tarjamah.....	I
B. Pasal-pasal.....	III
C. Tabel.....	V
D Biodata Ulama'-ulama'.....	VI
E. Biodata Pribadi.....	VII
F. Data-Data.....	VIII

SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Reformasi 98, yang diyakini sebagai zaman peralihan menuju kehidupan baru bagi bangsa Indonesia, dari rezim otoriterian menuju demokrasi, peradaban yang dicita-citakan bangsa sebagai zaman perubahan, keterpurukan rakyat dan bangsa selama 32 tahun sebagai budak rezim adalah sejarah suram Indonesia. Semua problem kebangsaan akan dapat diselesaikan pada pasca reformasi, itulah yang disumbangkan tokoh reformasi pada waktu itu. Era reformasi sering juga disebut era baru lahirnya demokrasi dan identitas lokal.

Tahun demi tahun selang berganti, zaman reformasi sebagai harapan untuk menjadi bangsa yang lebih baik kini hanya jadi angan belaka, ketika kemajuan yang diharapkan, namun kemunduran yang didapat. Rakyat masih mengalami kehidupan yang sama pada masa otoritarian. Seperti, masih ada kekuatan dalam masyarakat yang belum dapat dihilangkan, sebagai kekuatan baru yang mendominasi dan tetap memberikan kebijakan yang sangat berpengaruh dalam masyarakat.

Bertolak dari reformasi, bahwa apa yang menjadi sosialisasi demokrasi pasca orde baru (rezim militer) adalah sangat luar biasa, namun ketidaksiapan dari masyarakat dan elite mengakibatkan pengalihan arti demokrasi menjadi liberalisasi. Dari sini terlihat bahwa Indonesia belum mampu menjadikan rakyat sebagai kekuatan utama untuk perubahan. Masih ada patronase kepemimpinan yang mempengaruhi dalam pola kekuatan politik yang berkembang di Indonesia.

Dalam hal ini politik aliran masih tetap mempengaruhi kekuatan-kekuatan masyarakat. Reformasi juga melahirkan desentralisasi pada semua daerah. Pada zaman sebelumnya politik sentralisasi sangat mempengaruhi dalam masyarakat. Memarginalisasikan kekuatan masyarakat sehingga melepaskan diri untuk mencari bentuk dan varian yang lebih dinamis. Proses desentralisasi cukup pesat perkembangannya di tanah air, menandai berseminya bibit-bibit demokrasi yang mulai tumbuh di tingkat lokal. Meskipun proses di tingkat lokal tidak semuanya mencerminkan dan membuahkan produk yang didalamnya mengandung semangat demokrasi. Respon atas desentralisasi yang menggebu-gebu di beberapa daerah terkadang mengukuhkan struktur dan kultur lama yang di dalamnya sarat dengan nilai-nilai demokrasi.<sup>1</sup>

Melihat fenomena di atas, pesatnya arus lahirnya demokrasi dan desentralisasi pada saat ini, merupakan salah satu ruang untuk membuktikan bahwa kekuatan rakyat akan sangat mempengaruhi kehidupan berpolitik ataupun bernegara. Dengan kondisi negara Indonesia saat ini, yaitu hidup di zaman transisi, apakah demokrasi dan desentralisasi akan dapat dilaksanakan.

Dalam posisi dan kondisi negara sedang mengalami transisi, kadang ketidaksiapan berpolitik untuk menghadapi problem baru yang dilahirkan oleh kekuatan baru maupun kekuatan lama, maka tidak jarang yang terjadi adalah penelikungan atas wacana demokrasi. Begitulah sekarang yang terjadi di negara kita ini, meski kita sadari atau tidak.

---

<sup>1</sup> Abdur Razaki dan Titok Hariyanto (ed), '*Membongkar Mitos Keistimewaan Yogyakarta* cet ke-1 (Yogyakarta: IRE pers 2003), hlm 1.

Reformasi yang selama ini dinilai secara *eufemistik* dan *romantic* sebagai pendorong untuk bekerjanya nilai demokrasi, sebenarnya ada maksud tertentu yang tersembunyi untuk menghidupkan struktur dan kultur lama, tanpa mengindahkan tantangan yang dihadapi masa depan. Tidak sedikit daerah-daerah di tanah air yang semangat menjalankan desentralisasi dan demokratisasi terjebak dan salah arah dalam upaya menghidupkan kembali dalam struktur feodal dengan cara mempersempit area kompetisi dan partisipasi rakyat. Karena setiap daerah akan menunjukkan posisinya masing-masing dalam rangka demokrasi dan desentralisasi, karena setiap daerah di Indonesia mempunyai *made of production* dari budaya, ekonomi, sosial sampai tahap politik.

Demokrasi dan desentralisasi politik tidak terlepas dari kekuatan Yogyakarta yang terkenal dengan keistimewaannya, baru-baru ini kebijakan tentang keistimewaan Yogyakarta sempat membuat heboh wacana politik dan melahirkan pro dan kontra di kalangan intelektual, aktifis dan LSM. Sampai ada kajian dan penelitian membongkar tentang keistimewaan Yogyakarta. Sultan Hamengku Buwono X merasa sangat bangga ketika ada pusat studi<sup>2</sup> yang menggagas tentang wacana keistimewaan Yogyakarta, seperti dalam makalah sambutan Beliau dalam salah satu seminar :

“ Ketika saya menerima gagasan akan digelar wacana akan keistimewaan Yogyakarta, ada perasaan bangga, karena pemrakarsanya adalah kaum muda, yang biasanya kurang peduli dengan hal-hal yang seperti itu. Oleh sebab itu, serta merta saya seperti tergugah untuk merefleksi kembali

---

<sup>2</sup>Pusat Studi Masyarakat (PSM) Yogyakarta, melakukan seminar-seminar yang mengangkat sosial, politik dan budaya. Salah satunya adalah melakukan seminar yang mengangkat tentang keistimewaan Yogyakarta

peristiwa lebih dari 70 tahun yang lalu, saat dilaksanakannya kongres pemuda ke-2 . ketika itu kaum muda Indonesia telah melahirkan wawasan kebangsaan dan mendorong percepatan menuju tercapainya Indonesia merdeka”<sup>3</sup>.

Keistimewaan yang diperoleh secara de facto (sejak adanya konsensus politik melalui piagam yang dikeluarkan oleh presiden RI Soekarno 19 Agustus 1945 dan serta dilanjutkan amanat bersama dari kedua kerajaan yang ada di Yogyakarta hingga integrasinya kedua kerajaan ke republik) dan secara de jure (dari lahirnya UU No 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta). Dari sinilah awal pergulatan politik di Yogyakarta. Dengan pemberian hak Istimewa ini, Yogyakarta secara otomatis berwenang atas daerah kekuasaannya dan bentuk pemerintahan.

Karena Yogyakarta mempunyai dua bentuk pemerintahan,yaitu: *pertama*, pemerintahan yang berbentuk Kerajaan (yang berhubungan dengan kearifan lokal. *Kedua*, pemerintahan daerah (yang berhubungan dengan politik modern). Dari kedua pemerintahan dalam satu daerah ini, yang menjadi pemimpin adalah Sultan dan didampingi Paku Alaman (dwi-tunggal).

UU No 22 Tahun 1999 sebagai terobosan baru bagi pemerintahan sentralisasi menjadi desentralisasi. Begitu pula dalam pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam penjelasan pasal 122 UU No.22 tahun 1999, yang berbunyi: Pengakuan keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

---

<sup>3</sup>Pidato ini berupa tulisan makalah yang dibacakan oleh wakil dari Sultan yang disampaikan pada waktu seminar yang dilakukan oleh Pusat Study Masyarakat (PSM ) Yogyakarta dengan tema “ *Keistimewaan Yogyakarta di Mata Kaum Muda* “ pada tanggal 8 Maret 2004 di Gedung Kepatihan Yogyakarta.

didasarkan pada asal usul dan peranannya dalam sejarah perjuangan nasional, sedangkan isi keistimewaannya adalah dengan mempertimbangkan calon dari keturunan Sultan Yogyakarta dan Wakil Gubernur dengan mempertimbangkan calon dari Paku Alam yang memenuhi syarat yang sesuai dengan Undang-Undang ini.<sup>4</sup>

Dalam kenyataannya, ketika sistem kepartaian<sup>5</sup> berlangsung di Yogyakarta sebelum tahun 1999 partai pemenang adalah Golkar, dan pada saat itu Sri Sultan menjadi kader (ketua Golkar), dengan kata lain Sri Sultan pulalah yang menjadi Kepala Daerah. Namun pemilu tahun 1999 perpolitikan Yogyakarta mengalami perubahan cukup memukau. Jumlah penduduk yang berhak ikut pemilu 1999 adalah 1.929.404 pemilih dan yang menggunakan hak pilihnya sebesar 1.8328.405 orang atau 95,28 % dari 48 partai Pada saat itu yang menjadi pemenang dalam pemilu 1999 adalah dari PDIP yang mendapat suara lebih dari seperempat kursi di DPRD (35,53 %),<sup>6</sup> namun kalau di daerah selain Yogyakarta partai pemenang yang akan menduduki kepemimpinan daerah, berbeda yang terjadi di Yogyakarta. Ketika PDIP menang di Yogyakarta, partai berkepala banteng ini tidak bisa mengajukan kandidat menjadi Kepala Daerah. Yang menjadi Kepala Daerah tetap Sri Sultan dan Wakil Kepala Daerah adalah Paku Alam.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Otonomi Daerah 1999, (Jakarta: Sinar Grafika 2004), hlm 92.

<sup>5</sup> Pada dasarnya kalau partai yang menang akan menjadi pemimpin daerah.

<sup>6</sup> Data perolehan suara Parpol Pada Pemilu 1999 di DIY terlampir.

Fenomena diatas secara tidak langsung menggambarkan bahwa proses pemilihan Kepala Daerah menyempitkan peran partai. Dengan demikian ruang yang diberikan Yogyakarta belum sepenuh hati.

Berbicara Yogyakarta adalah membicarakan banyak hal dengan keistimewaannya, salah satunya adalah kepemimpinan yang sangat unik. Karena pada dasarnya pemimpin tidak terlepas dari kekuasaan dalam suatu negara pemerintahan. Sedangkan ada yang berpendapat kalau kekuasaan pada dasarnya tidak lebih dari kulit luar saja, bukan inti dari isi persoalan yang sesungguhnya. Dalam ilmu politik kekuasaan adalah hal yang sangat hakiki, dan hal yang hakiki adalah bagaimana caranya memperoleh, mempertahankan dan mengembangkan kekuasaan itu.<sup>8</sup>

Karena sifatnya yang sangat mendasar, maka di manapun ada kajian ilmu politik di situ terdapat konsep mengenai kekuasaan. Ada satu asumsi dasar dalam memandang kekuasaan sebagai kemampuan seseorang untuk perilaku yang sama dengan perilaku orang yang memegang kekuasaan, atau dalam istilah Ramlan Subakti, diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk menggunakan sumber-sumber pengaruh yang dimiliki untuk mempengaruhi pihak lain sehingga pihak lain berperilaku sesuai dengan pihak orang yang mempengaruhi.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> A Im'an Sukri dkk (penyusun), *Masa Depan Yogyakarta dalam Bingkai Keistimewaan*, (Yogyakarta: Parwi Fondation 2002)39-40.

<sup>8</sup> A. Rahman Zainuddin, *Kekuasaan dan Negara, Ibn Taimiyah*, (Jakarta: Gramedia Utama, 1992), hlm 5.

<sup>9</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu politik*, ( Jakarta :Gramedia, 1992 ), hlm. 58.

Dalam sejarahnya Yogyakarta merupakan penerus dari kerajaan besar Islam Mataram, dengan demikian konsep pemerintahan juga tidak lepas dari konsep pemerintahan menurut Islam. Membicarakan konsep Islam tidak akan terlepas dari sejarah terbentuknya pemerintahan Nabi. Sepeninggal Nabi, Beliau tidak mengajarkan konsep yang jelas tentang kepemimpinan dan praktik politik. Dengan ini maka konsep Khalifah (*sebutan dalam Islam*) sangatlah perlu. Tapi dalam Islam tidak ada konsep yang jelas diterangkan dalam al-Qur'an maupun As-Sunnah mengenai hal tersebut.<sup>10</sup>

Tidak jelasnya konsep khalifah, maka terjadi pertentangan oleh para ulama' yang berbeda persepsi dalam menilai sistem khalifah yang bersejarah.<sup>11</sup> Seperti al-Mawardi dan pemikir lain berpendapat khalifah historis sebagai keagamaan, Ibn Kaldun memandang lembaga yang bersifat keagamaan. Menurutnya setelah Khulafa al-Rasyidin sudah tidak bersifat keagamaan, karena telah berubah menjadi status kerajaan yang membentuknya solidaritas *klan*.<sup>12</sup>

Dengan perdebatan tentang Khalifah membawa para ulama' dalam kajian yang lebih dalam dan terjadi perpecahan kelompok dan sampai sekarang menjadi sekte-sekte. Seperti aliran Syi'ah dan Sunni dalam pendapatnya: aliran syi'ah mengatakan tentang siapa yang pantas jadi pemimpin adalah hanya Allah yang Maha tahu dan mengenali individu-individu yang memiliki sifat-sifat berilmu,

---

<sup>10</sup>Muhamad Assad, *Sebuah Kajian tentang Sistem Pemerintahan Islam*, alih bahasa Afif Muhammad, (Bandung : Pustaka, 1985 ), hlm. 45.

<sup>11</sup>M Sirajuddin Syamsudin, *Pemikiran Politik. Aspek yang Tertutupan dalam Sistem Pemikiran Islam*, dalam Ihsan Ali Fauzi (ed) *Refleksi Pembahasan Pemikiran Islam, 70 tahun Harun Nasution*, (Jakarta : LSAF, 1989 ), hlm. 251.

<sup>12</sup> Ibn Khaldūn, *Muqaddimah Ibn Khaldūn*, (ttp: Dar al-Fikr,t.t.), hlm 414.

tidak cacat, dan tidak mungkin keliru. Hanya orang-orang yang dekat dengan nabi yang punya kualitas seperti itu. Dalam hal ini adalah Ali, menurut Syi'ah Nabi Muhammad telah menunjuk Ali sebagai Khalifah.

Tidak hanya pada zaman Sahabat Nabi dan Khilafah Islam Abasyiyah dan Muawiyah menganut istilah *Khālifah*<sup>13</sup> begitupun dalam sejarah Islam Mataram juga menggunakan istilah Khalifahan (*Khālifah*) sebagai gelar raja kerajaan Islam Mataram, seperti gelar pada Sultan yang menjadi penguasa adalah *Sri Sultan Hamengku Buwono Senopati Ing Alaga Ngabdurrahman Sayidin Panatagama Kalifatullāh*. Dengan ini membuktikan bahwa terbentuknya Yogyakarta tidak dapat terlepas dari kekuasaan Islam.

Sekelumit kajian di atas tentang kekuasaan dan kepemimpinan (*Khālifah*), dapat ditarik benang penghubung, bahwa setiap periode dan zaman selalu mengalami perubahan menganut kondisi realitas kehidupan pada setiap zamanya. Dan itu terbukti dalam perjalanan sejarah perkembangan pemerintah Islam. Perubahan pemerintahan dari awal terbentuknya pemerintahan yang berlandaskan Islam, yaitu pada masa Nabi Muhammad hingga Khalifah al-Rasyiddin yang menganut dan berlandaskan pada sistem musyawarah dan keadilan sampai pada zaman kekuasaan Bani (sebagai awal terbentuknya kekuasaan yang menganut sistem kerajaan) yang tidak menggunakan musyawarah dalam pelaksanaan pemerintahan.

---

<sup>13</sup> Ada pendapat yang mengatakan bahwa setelah pemerintahan Khalifah Khulafa al-Rasyiddin sistem pemerintahan mengalami perubahan yaitu yang pada awalnya untuk memilih pemimpin dengan musyawarah, setelah Bani Muawiyah dan seterusnya memakai sistem keturunan dari pemimpin yang sebelumnya, kalau sekarang disebut sistem kerajaan atau Monarki.



Masih tentang demokrasi pada praktik politik, Islam mungkin tidak secara gamblang menerangkan demokrasi, tapi setidaknya ada nilai-nilai demokrasi yang dapat diambil, maka barangkali yang bisa ditemukan adalah *family resemblances* atau unsur-unsur atau nilai-nilai dasar demokrasi atau HAM. Artinya kita berusaha mencari doktrin-doktrin Islam yang kira-kira paling tepat yang kita lakukan. Di luar itu sudah menjadi interpretasi yang elaboratif dan karenanya hanya berfungsi sebagai spektrum atau pandangan Islam tentang demokrasi. Tidak banyak sebetulnya yang di list tentang dasar-dasar Islam bagi demokrasi. Yang paling populer dan ini sudah sering dilakukan orang adalah prinsip keadilan (*'adl*), musyawarah atau konsultasi (*Syūrā*) dan persamaan atau egaliter (*al-Musāwāh*). Inilah prinsip dasar yang sebanding dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Meskipun hanya sedikit tapi nilai-nilai disebut berulang kali dalam al- Qur'an atau Sunnah Nabi.<sup>14</sup>

Dari segi pemerintahan dalam Islam, terdapat dua dimensi pemerintahan antara pemerintahan yang ada di Yogyakarta dengan pemerintahan yang diterapkan dalam Islam (mengacu pada historisitas), yaitu pemerintahan Yogyakarta yang berbentuk kerajaan dengan nilai demokrasi yang ditawarkan oleh Islam dalam pelaksanaan pemerintahannya.

Sedangkan hubungannya dengan pemerintah pusat RI, Yogyakarta sebagai daerah yang diistimewakan, dalam praktik politik dan pengambilan keputusan atas daerahnya. Karena perhitungan sejarah, Yogyakarta adalah daerah yang

---

<sup>14</sup> Bahtiar Effendy, " *Pergulatan Pesantren dan Demokratisasi* " ( Jakarta :LkiS dengan P3M dan Pact-INPI Indonesia, 2000 ) hlm .28.

mempunyai kerajaan yang pada awal pemerintahan Indonesia menyatakan mendukung dan bergabung pada NKRI. Sikap politik yang dilakukan Yogyakarta pada masa itu membawa Yogyakarta hingga mendapat status keistimewaan dari NKRI.

#### B. Pokok Masalah.

Berdasarkan pada realitas yang terjadi, Yogyakarta sebagai satu daerah yang diistimewakan oleh RI, yang berimplikasi pada bentuk pemerintahan sendiri, berupa kekeratonan (*Kerajaan*), dan pemerintahan daerah (pemerintahan nasional), Kepemimpinan yang bersifat dwi-tunggal kekuasaan. Sehingga terlihat sangat sentralistik kekuasaan, demokrasi sebagai pilihan sistem politik yang berkembang disebagian belahan dunia terabaikan. Maka cukup beralasan kalau studi ini khusus membahas tentang berjalanya pemerintahan di Yogyakarta. Daerah yang diistimewakan oleh bangsa Indonesia, karena ada sebuah ketetapan hukum yaitu Pasal 18 No. 18 UUD 1945, Pasal 122 UU No 22 Tahun 1999.

Merujuk pada perkembangan demokrasi dan kenyataan tersebut, maka pertanyaan mendasar yang menjadi pokok masalah dalam kajian skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Kenapa Daerah Istimewa Yogyakarta memandang status istimewa.
2. Bagaimana penyelenggaraan pemerintahan Yogyakarta berhubungan dengan demokrasi yang berkembang.
3. Bagaimana pemerintahan Islam memandang fenomena pemerintahan DIY.

### C. Tujuan dan Kegunaan.

Diperlukan suatu masa transisi sebagai prakondisi dalam menggulirkan semangat demokratisasi dalam konteks kepemimpinan di Yogyakarta.

Tujuan yang dikehendaki peneliti adalah :

1. Untuk mendiskripsikan daerah keistimewaan Yogyakarta.
2. Untuk mendiskripsikan penyelenggaraan pemerintahan daerah Istimewa Yogyakarta yang berkaitan dengan tetapnya kekuatan keraton di tengah demokrasi.
3. Untuk mendiskripsikan keberadaan pemerintahan Yogyakarta dalam perspektif politik dalam Islam.

Adapun setelah paripurnanya penelitian ini diharapkan hasilnya akan bermanfaat dan berguna sebagai:

1. Sebagai penambah khasanah kepustakaan para peminat wacana perkembangan demokrasi yang berlaku di Yogyakarta khususnya dan Indonesia umumnya.
2. Sebagai kajian ulang tentang latar belakang sosio-politik yang melahirkan rumusan Keistimewaan Yogyakarta, sehingga mempengaruhi kemunculan kekuatan-kekuatan yang ada untuk menjadikan Yogyakarta sebagai daerah keistimewaan dan sekaligus mempunyai Undang–Undang keistimewaan sendiri ketimbang daerah- daerah lain di tanah air.
3. Memperkaya perspektif tentang demokrasi, sehingga tercipta pemerintahan yang demokratis.

#### D. Telaah Pustaka.

Dalam sejarah Indonesia ada dua daerah istimewa yaitu Aceh Darussalam (*sekarang NAD*) dan Yogyakarta. Yogyakarta adalah satu daerah yang mempunyai keistimewaan dan sekaligus mempunyai Undang–undang tersendiri untuk mengatur wilayahnya. Sebagai contoh keistimewaan Yogyakarta di antaranya adalah dalam hal kepemimpinan daerah, ada dualisme (dwi-tunggal) kepemimpinan dalam satu wilayah, secara *de jure* ditetapkan secara otomatis selain Sultan sebagai Raja, Beliau sekaligus sebagai kepala Daerah Istimewa Yogyakarta. Begitu pula Paku Alam secara otomatis menduduki sebagai wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemberian hak istimewa ini mempunyai landasan hukum, yaitu mulai dari ditetapkan Pasal 18 UUD 1945, Undang-undang Nomor 3 tahun 1950 Undang-Undang No. 19 Tahun 1950 yang mengubah Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. UU No.22/1999 sebagai awal desentralisasi, dan bergoalak kembali tahun 2001, pembuatan RUU Keistimewaan Yogyakarta oleh DPRD DIY dan dibentuk pansus yang dikepalai oleh Afan Gaffar.

Selain itu juga menurut P.J. Suwarno seorang sejarawan mengungkapkan tentang “ *Yogyakarta disebut sebagai daerah keistimewaan karena asal usulnya berbentuk kerajaan yaitu kerajaan Islam mataram, yang pada waktu itu kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman*”<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> P.J Suwarno, “Keistimewaan Yogyakarta di Mata Kaum Muda” Seminar dan diskusi panel Pusat Studi Masyarakat Yogyakarta, sebagai pemakalah, Yogyakarta 8 Maret 2004.

Melalui pembacaan sejarah di atas peneliti menggunakan buku-buku yang mengacu pada kerajaan Islam Mataram. Sebagai bahan rujukan atau referensi, penelitian ini, peneliti tidak begitu kesulitan, karena banyak buku yang membahas keistimewaan, maka peneliti mengacu pada UU yang mengangkat keistimewaan Yogyakarta dan draf RUU Yogyakarta. Handoyo, *Kilas balik Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Sebuah Tinjauan Historis dan Yuridis)*.<sup>16</sup> buku ini mengungkap tentang sejarah terbentuknya Yogyakarta menjadi daerah keistimewaan. Begitu juga buku karangan Soedarisman Poerwokoesoemo; yang berjudul *Daerah Istimewa Yogyakarta*<sup>17</sup> tentang ketentuan berbagai sumber hukum dalam pemerintahan DIY dari zaman ke zaman, dari tingkat Kabupaten, Kotamadya dan Desa.

Sudjatmo; *Daerah Istimewa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*.<sup>18</sup> isi buku ini menerangkan tentang hubungan antara pemerintahan Yogyakarta dengan pemerintahan pusat atau RI.

Suwarno P.J.; *Hamengkubuwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974*,<sup>19</sup> isinya tentang pelaksanaan pemerintahan Yogyakarta

---

<sup>16</sup> B.Hestu Cipto Handoyo, *Kilas Balik Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Sebuah Tinjauan Historis Yuridis)*. (Yogyakarta :Penerbitan Universitas Atma Jaya 1998).

<sup>17</sup> Sudarisman Poerwokoesoemo, *Daerah Keistimewaan Yogyakarta*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press 1984).

<sup>18</sup> Sudjatmo, *Daerah Istimewa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*. (Jakarta: PT Bina Aksara 1988).

<sup>19</sup> Suwarno. *Hamengkubuwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintah Yogyakarta 1924-1974*. (Yogyakarta: Kanisius 1994)

tentang kependudukan Belanda dan Jepang sampai pada berakhir masa jabatan HB IX.

Selo Sumarjan; *Perubahan Sosial di Yogyakarta*,<sup>20</sup> tentang pemerintahan pemerintahan di Yogyakarta dari masa ke masa dengan perubahan-perubahan. Perubahan pemerintahan, sosial dan pembangunan ekonomi, pendidikan.

G. Moedjanto, M.A. *Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman*,<sup>21</sup> tentang sejarah terbentuknya Kasultanan dan Paku Alaman hingga menjadi Yogyakarta, dan sikap-sikap politik yang diambil setiap raja.

Peneliti juga menggunakan buku-buku yang mengangkat tentang penelitian keistimewaan Yogyakarta seperti penerbit IRE press dalam bukunya Bambang Purwanto dan Sutoro Eko (penagantar); *“Membongkar mitos Keistimewaan Yogyakarta”*.<sup>22</sup> Isi dari buku ini menguak keberagaman Yogyakarta dan keistimewaanya.

Penerbit Parwi Foundation dalam bukunya Samsurizal Panggabean, MSc (pengantar); *“Masa Depan Yogyakarta dalam Bingkai Keistimewaan”*;<sup>23</sup> Yang mengungkap tentang sejarah keberadaan Yogyakarta dari awal terbentuknya Yogyakarta sampai terjadinya keistimewaan Yogyakarta, dari mulai gambaran

---

<sup>20</sup> Selo Sumardjan, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, (Yogyakarta: Gadjahmada Press, 1991).

<sup>21</sup> G. Moedjanto *Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman*, (Yogyakarta: Kanisius. 1994)

<sup>22</sup> Abdur Razaki dan Titok Harianto (ed). *Membongkar Mitos Keistimewaan Yogyakarta*, (Yogyakarta : IRE Press Yogyakarta, 2003)

<sup>23</sup> Aim'an Sukri, dkk. (TIM penyusun). *Masa Depan Yogyakarta dalam Bingkai Keistimewaan*, (Yogyakarta: Parwi Fondation 2004).

politik pemerintahan, sosial, pertanian, pariwisata dan prekonomian dan kondisi sosiokultural. Peneliti juga mengambil data dari pemerintah daerah dan mengikuti seminar–seminar yang mengangkat tentang keistimewaan Yogyakarta, seperti yang dilakukan PSM (Pusat Studi Masyarakat) Yogyakarta yang pada akhir-akhir ini melakukan banyak seminar tentang Keistimewaan.

Geneologi kerajaan Islam Mataram akan membantu untuk sejarah Yogyakarta dari pandangan Islam. Buku tentang sejarah perkembangan Islam di Jawa sebagai acuan dalam penelitian ini, di antaranya adalah *Nusa Jawa: Silang Budaya (yang terdapat tiga jilid yaitu: jilid 1 Batas-batas Pembaratan, Jilid 2; Jaringan Asia, Jilid 3; Warisan Kerajaan-Kerajaan Konsentris)*<sup>24</sup> Denys Lombard yang mengungkap semua kerajaan-kerajaan yang ada di pulau Jawa beserta perkembangannya. *Babat tanah Jawi*, mengungkap berdirinya kerajaan Islam Mataram.

Korelasi pembahasan tentang pemerintahan Islam, kami menggunakan buku pokok, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*<sup>25</sup> H. Munawir Sjadzali, tentang periode–periode dalam pemerintahan Islam, yaitu masa Nabi Muhammad, Khulafa al-Rasyidin, pasca Khulafa al-Rasyiddin. *Islam di Tinjau dari Berbagai Aspeknya, jilid I* oleh Harun Nasution, mengurai sejarah singkat periode pemerintahan Islam. *Politik Islam dalam Lintas Sejarah* oleh W. Montgomery Watt, mengurai perjalanan pemerintahan Islam atau menelusuri

---

<sup>24</sup> Denys Lombard *Nusa Jawa: Silang Budaya; Jilid 1 Batas- batas Pembaratan, Jilid 2 Jaringan Asia, Jilid 3 Warisan Kerajaan – Kerajaan Konsentris*. (Jakarta: PT SUN 1996).

<sup>25</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press 1993).

akar politik Islam yang tidak hanya berdasarkan pada teori yang tertulis, tetapi berdasarkan pada empirik. Setelah sejarah terungkap maka pandangan tentang demokrasi untuk pemerintahan merujuk pada:

*Pergaulan Pesantren dan Demokrasi (P3M)* Ahmad Suaedy (editor), mengungkapkan tentang penyebaran nilai-nilai demokrasi melalui Islam.

Tesis yang mengangkat tentang UUD 45 dan konstitusi Madinah dengan judul *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Madinah dan UUD 45*<sup>26</sup> yang ditulis oleh Muhamad Alim, menerangkan tentang perkembangan demokrasi HAM dalam hubungan UUD 45 dan Konstitusi madinah. *Identitas politik umat Islam*,<sup>27</sup> KuntoWijoyo mengungkapkan tentang bagaimana umat Islam dalam menyelenggarakan aktivitas politik sesuai dengan nilai-nilai Islam.

*Perbandingan Sistem Politik*<sup>28</sup> oleh Mohtar Mas'ud (ed), Colin Mac Andrews, yang memuat tentang bentuk atau sistem-sistem politik di berbagai negara di dunia.

Skripsi yang mengangkat tentang Yogyakarta yang berhubungan dengan permasalahan Skripsi ini dengan judul *Peran DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Pemilihan Kepala Daerah pada Era Otonomi Tahun 2003 (Perspektif Fiqih Siyasah)*,<sup>29</sup> yang ditulis oleh Yohana Andriyani Fakultas

---

<sup>26</sup> Muhamad Alim, (*Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945* (Yogyakarta: UII Press 2001)

<sup>27</sup> Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, (Bandung: Mizan dan Ummah [majalah Dwimingguan] 1997 ).

<sup>28</sup> Mohtar Mas'oed, dan Colin Mac Andrews, *Perbandingan Sistem Politik*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Prees 2001).



sehingga mampu berjalan dengan baik. Dengan ini, Indonesia dengan sejarah nasional yang banyak melakukan fase-fase perubahan, seperti revolusi nasional tahun 45, dan terakhir adalah reformasi 98, yang melahirkan demokrasi yang ada di Indonesia.

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode sejarah, karena keistimewaan bagi Yogyakarta tidak terlepas dari sejarah. Dalam sejarahnya, lahirnya UU keistimewaan Yogyakarta mengalami kontroversi, seperti para tokoh atau penyusun UU banyak mengalami kontroversi mengenai adanya rumusan UU keistimewaan Yogyakarta. Terlebih tentang UU No 22 Tahun 1948 tentang Pemerintah Daerah, yaitu keistimewaan dalam hal kepemimpinan di Yogyakarta yang memberikan hak kepada keturunan keluarga kesultanan dan kepatihan untuk menjadi Kepala Daerah Istimewa. Dengan demikian UU No 22 Tahun 1948 yang dipastikan secara formal atas keistimewaan Yogyakarta. dalam UU No 3 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta dan memberikan landasan hukum tentang hak otomatis sebagai kepala daerah istimewa dari kalangan kraton.<sup>32</sup>

UU No. 22 Tahun 1999 sebagai terobosan baru bagi pemerintahan daerah, yang sebelumnya sentralisasi menjadi desentralisasi. Begitu pula dengan Penetapan Yogyakarta mendapat tempat khusus pada Pasal 122 UU No. 22 Tahun 1999, dalam disebutkan: *“Keistimewaan dalam propinsi Aceh dan Propinsi Daerah Yogyakarta sebagai mana disebut dalam UU No. 5 Tahun 1974, adalah tetap dengan ketentuan bahwa penyelenggaraan dalam pemerintah*

---

<sup>32</sup>Abdur Razaki dan Titok Hariyanto (ed), *Membongkar Mitos*, hlm. 31-32.

*Propinsi Istimewa Aceh dan Propinsi Istimewa Yogyakarta di dasarkan pada UU ini*".<sup>33</sup> Dengan demikian konteks keistimewaan Yogyakarta lebih mengaku pada kepemimpinan dalam kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Kontroversi yang masih berkembang tentang keberadaan UU keistimewaan, ada dua versi atau kelompok yang berdebat. Seperti yang diungkapkan Suturo Eko, ada dua haluan dalam perdebatan keistimewaan yaitu golongan konservatif dan transformatif. Konservatif cenderung terbelenggu pada basis feodalistik dan di pengaruhi oleh paradigma klientilisme. Haluan ini cukup luas dengan kepemimpinan kharismatik-*benevolent*, serta mempunyai visi mempertahankan status formal keistimewaan Yogyakarta yang sudah ada, sesuai dengan khasanah budaya Yogyakarta, aturan hukum yang ada serta pengalaman sejarah masa lalu. Haluan golongan transformatif menebarkan wacana kritis alternatif tentang keistimewaan Yogyakarta, kelompok ini mempunyai wawasan global lebih menyeluruh dan memandang jauh ke depan, ketimbang beromantisme dengan sejarah.<sup>34</sup>

Terlepas dari kontroversi di atas, tentang bentuk pemimpin yang ada di Yogyakarta adalah tetap melanggengkan kekuasaan lama dan setia pada sejarah yang melahirkan Yogyakarta. Karena psikologi masyarakat juga mempengaruhi kepemimpinan yang ada di Yogyakarta. Selain itu konstitusi juga menjadi landasan formal dalam penyelenggaraan praktek politik.

---

<sup>33</sup> Undang-Undang Otonomi Daerah 1999, (Jakarta: Sinar Grafika 2004), hlm 48.

<sup>34</sup> Abdur Razaki dan Titok Hariyanto (ed), *Membongkar Mitos*, hlm xxxiv.

Dengan demikian, teori tentang sistem politik dirasa sangat perlu, maka dalam hal ini peneliti menggunakan dua teori sistem politik. Yaitu peneliti menggunakan teori demokrasi dan monarki. Karena peneliti memandang ada dua pemerintahan yang terjadi di Yogyakarta, yaitu pemerintahan daerah dan pemerintahan Kerajaan.

Pemerintahan Islam dalam sejarah perkembangan Islam, pernah mengalami masa yang paling maju, masa Nabi dan kekhalifahan,<sup>35</sup> pasca wafatnya khalifah, sistem pemerintah berubah menjadi sistem baru yang dilahirkan oleh Muawiyah dan Abasiyyah.<sup>36</sup> Yaitu sistem kerajaan. Maka teori pemerintahan dalam Islam dan kekuasaan dalam Islam mengalami perubahan pasca runtuhnya kekuasaan Madinah ke kekuasaan yang bersifat kekeluargaan. Peristiwa ini dijadikan Musyawah ( persamaan peristiwa ) pemerintahan.

Untuk menganalogikan peristiwa atau praktik pemerintahan yang terjadi di Yogyakarta dengan praktik pemerintahan dalam Islam, maka kami menggunakan teori dalam ushul fiqih, terdapat dasar atau sumber hukum, yaitu *Qiyās*. Secara definitif qiyas adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nash hukumnya dengan suatu kasus yang ada hukumnya, dalam hukum yang ada nashnya, karena persamaan kedua itu dalam Illat hukumnya.<sup>37</sup> Dengan kata lain

---

<sup>35</sup> Istilah pemerintahan dalam Islam pada masa sahabat nabi, setelah nabi wafat. Tentang pemerintahan Islam akan dijelaskan pada bab berikutnya,

<sup>36</sup> Nama Bani pada masa setelah pemerintahan para shahabat Nabi, penguasa yang melahirkan sistem kerajaan dalam pemerintahan Islam, karena masa ini tumbuh pemimpin dipegang secara turun temurun Harun Nasution, *Islam di tinjau dari berbagai aspeknya*, jilid I, Jakarta UI Press. dan UUD 1945, (Yogyakarta UII Press 2001). dan H. Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press 1993).

pembandingan atau persamaan dua peristiwa untuk mencari penerapan hukum secara analogis.<sup>37</sup> Yaitu antara praktik pemerintahan Islam pada masa Nabi Muhammad dan Khulafa al-Rasyiddin dengan pelaksanaan pemerintahan di Yogyakarta.

Karena Secara historis Yogyakarta lahir dari kerajaan Islam Mataram, pada waktu kerajaan Islam Mataram menganut sistem kerajaan, sedangkan Islam sekarang akan membuka lebar-lebar jalan wacana demokrasi. Dan Yogyakarta adalah masa depan kerajaan Mataram, maka tidak kemungkinan pula Yogyakarta juga mampu membuka diri tanpa menghilangkan keistimewaan yang utuh dan lebih istimewa dengan banyaknya ragam.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang di lakukan berkaitan dengan studi dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*) maka tehnik yang di gunakan adalah mengumpulkan data secara literer yaitu penggalian daftar pustaka yang koheren dengan obyek pembahasan. Selain itu penelitian lapangan juga dilakukan peneliti, karena peneliti dalam hal ini menggunakan data-data dari Pemerintah Propinsi DIY, menggunakan bahan-bahan dari seminar-seminar yang mengangkat tentang keistimewaan Yogyakarta. Undang-Undang yang menerangkan tentang keistimewaan Yogyakarta dan buku yang meneliti tentang

---

<sup>37</sup>Wahhab al-Khallaf, *'Ilmu Ushul Fiqh*, teks Arab ke Indonesia, alih bahasa H.Moh.Zuhri,Dipl.TAFL dan Ahmad Qorib, Cet ke-1 (Semarang: Dina Utama (Thoha Putra Group), 1994), hlm. 66.

<sup>38</sup> Rahmat Syafe'I, *'Ilmu Ushul Fiqih*, cet ke-1, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 86-88.

Undang–Undang keistimewaan Yogyakarta khususnya yang berkaitan tentang demokrasi. Dan mengumpulkan data dari semua pihak yang bersangkutan.

## 2. Tipe Penelitian.

Tipe penelitian untuk menyusun skripsi ini diskriptif-analitik, yaitu memusatkan diri pada pemecahan masalah dengan cara mengumpulkan data, lantas data yang sudah terkumpul di susun, di jelaskan dan selanjutnya di analisis.

## 3. Pendekatan

Untuk mengkaji yang menjadi obyek penelitian, peneliti menggunakan historis, normatif analisis, yaitu berusaha menggali data tentang lahirnya keistimewaan Yogyakarta sehingga masuk dalam UU keistimewaan, yang berhubungan dengan kontek Monarki kekuasaan kraton dan cita- cita demokrasi yang seharusnya terjadi di Yogyakarta. Akan tetapi kesimpulan akhirnya tidaklah berdasarkan dari analisis normatif saja, akan tetapi juga menggunakan pendekatan sosiologi.

## 4. Analisis Data

Setelah data terkumpul, kemudian di analisis sehingga menghasilkan suatu pemahaman dan kesimpulan. Untuk analisis ini peneliti menggunakan beberapa metode, yaitu :

1. Induksi yaitu pola penalaran yang berangkat dari data yang bersifat umum untuk menghasilkan kesimpulan yang bersifat khusus. Dimulai dari menjelaskan tentang sistem politik dan menjelaskan tentang

sejarah lahirnya Yogyakarta dan praktik politik Yogyakarta.

Hingga mendapatkan kesimpulan bentuk praktik politik.

2. Komperatif, pola penalaran yang digunakan adalah berangkat dari praktik politik di Yogyakarta dengan praktik politik Islam, sehingga mendapatkan korelasi antara kedua praktik politik tersebut.

#### G. Sistematika Pembahasan.

Agar peneliti lebih terarah, maka pembahasan akan di buat sistematika sebagai berikut :

Bab pertama peneliti akan sedikit pemaparan yang berisi: latar belakang masalah, Pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua peneliti mengungkapkan tentang pemerintahan Islam. Agar mempermudah peneliti, maka dalam bab ini di bagi dalam dua sub, sub pertama konsep Islam tentang pemerintahan, yang peneliti terangkan menggunakan metode waktu atau masa, yaitu masa pemerintahannya Nabi Muhammad, Khulafa al-Rasyidin, pasca Khulafa al-Rasyidin. Sedangkan sub kedua tentang sistem politik pemerintahan, terdapat dua sub lagi tentang Demokrasi (umum dan pandangan Islam) dan Monarki.

Bab ketiga peneliti mengungkapkan tentang Daerah Istimewa Yogyakarta. Bab ini di bagi tiga sub pembahasan, Sub pertama tentang sejarah Yogyakarta menuju Daerah Keistimewaan, terbagi atas masa: masa pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Sub ke dua tentang status keistimewaan. Sub ketiga tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta,

peneliti menggunakan metode waktu atau masa, yaitu masa kependudukan Belanda, masa kependudukan Jepang, masa Revolusi dan masa Reformasi.

Bab keempat peneliti membagi dua sub, sub pertama menerangkan dan menganalisis tentang status keistimewaan Yogyakarta, dibagi dalam dua sub pembahasan yaitu bergabungnya ke NKRI (HB IX) dan Maklumat Sidang Rakyat Yogyakarta. Sub kedua penyelenggaraan pemerintah DIY dengan Pemerintahan Islam, diterangkan dalam dua sub yaitu dilihat dari demokrasi dan Monarki.

Dan pada akhirnya penelitian ini ditutup dengan bab lima yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penyusun memaparkan tiga pokok permasalahan beserta analisa di atas, maka dalam bab V ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan yang menjadi intisari dari penelitian ini, yaitu:

1. Yogyakarta mendapat status keistimewaan karena wilayah ini telah dikuasai oleh otoritas Kerajaan Kasultanan dan Paku Alaman. Lebih dari itu, kedua kerajaan ini adalah bukti historis awal terbentuknya Yogyakarta. Selain itu ada beberapa landasan mengapa Yogyakarta menjadi Daerah Istimewa, antara lain; landasan historis, landasan hukum, landasan sosial budaya, serta landasan politik.
2. Dalam penyelenggaraan praktik politik dan pelaksanaan pemerintahan, secara konstitusional (*de jure*), UU Nomor 22 Tahun 1999 merupakan Undang-Undang yang membawa Yogyakarta memperoleh keistimewaan dalam melangsungkan pemilihan pemimpin secara demokratis. Begitu pula dalam kenyataannya (*de facto*), dengan adanya maklumat sidang rakyat mengukuhkan bahwa masyarakat masih tetap menghendaki Sultan dan Paku Alaman sebagai pemimpin.
3. Dalam sejarah kepemimpinan Islam dapat dilihat bahwa sistem kepemimpinan Islam menjunjung nilai-nilai demokrasi, tidak menganut adanya sistem Monarki (peralihan kepemimpinan secara turun temurun) yang pada saat ini masih dipertahankan di Yogyakarta. Dan Islam selalu



memberikan ruang bagi siapapun untuk berkompetisi menjadi pemimpin. Begitu pula secara konstitusional seperti tertuang dalam penjelasan pasal 122 UU No. 22 Tahun 1999, menggambarkan nilai-nilai demokrasi. Namun demikian, pelaksanaan demokrasi tetap memberi ruang penyesuaian praktik yang berbeda-beda sesuai zaman dan tempatnya, seperti yang terjadi di Yogyakarta.

#### **Saran – Saran.**

1. Keistimewaan Yogyakarta dengan segenap landasan yang dimiliki hendaknya menjadi modal pengembangan potensi daerah ke arah kesejahteraan yang berkeadilan dan kehidupan politik yang lebih responsif-partisipatif.
2. Pengakuan dan legitimasi bahwa pemimpin daerah ini adalah raja Mataram atau setidaknya berasal dari keluarga Kraton hendaknya tetap mempertimbangkan aspek partisipasi masyarakat. Partisipasi ini dapat diakomodasi melalui saluran-saluran lembaga politik dan organisasi-organisasi masyarakat yang ada berkenaan dengan pengambilan kebijakan publik. Dengan demikian, pengertian “istimewa” dalam pasal 122 UU No. 22 Tahun 1999 tidak semata-mata soal kepemimpinan, tapi mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat.
3. Praktik demokrasi sebagaimana yang terjadi di Yogyakarta bukanlah teori politik yang normatif, melainkan kenyataan historis yang sewaktu-waktu dapat dikritik atau bahkan dirubah. Tentu saja

hal tersebut terpulang kepada kehendak politik masyarakat Yogyakarta.

4. Dalam penyusunan skripsi ini, Penyusun menyadari masih banyak kesalahan dan persoalan yang belum terungkap dalam penyusunan skripsi ini, dikarenakan keterbatasan pengetahuan penyusun untuk mengungkap tentang Daerah Istimewa Yogyakarta. Maka sangat diharapkan saran dan kritik sebagai masukan untuk kedepan.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Al-Qur'an:

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim dan Tarjamahnya*, dan Yayasan Penyelenggara Penterjemah Dept. Agama R.I. Jakarta.

### b. Ushul Fiqih :

Syafe'i Rahmat, *Ilmu Ushu>l Fiqih*, cet ke-1, Bandung : CV Pustaka Setia, 1999.

Wahhab al-Khallaf, Abdullah, *Ilmu Us}hu>l al-Fiqh*, teks Arab ke Indonesia, alih bahasa Moh.Zuhri, dan Ahmad Qorib, Cet ke-1 Semarang : Dina Utama Thoha Putra Group, 1994.

### c. Buku Lain

Alim Muhamad, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi madinah dan UUD 1945*, Yogyakarta; UII Press, 2001.

Sykri Aim'an, dkk. (TIM penyusun), *Masa Depan Yogyakarta dalam Bingkai Keistimewaan*, Yogyakarta: Parwi Fondation, 2004.

Gafar Afan, Dkk, *Otonomi Daerah; dalam Negara Kesatuan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, kerja sama Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan*, 2002.

Gie, The Liang, *Pertumbuhan Pemerintahan daerah di Negara Republik Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1993.

Gunaryo Ahmad (ed), Soesanto, *Hukum Birokrasi dan Kekuasaan Di Indonesia*, Semarang: Walisongo ReseachInstitute (WRI), 2001.

Handoyo, B.Hestu Cipto, *Kilas balik Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Sebuah tinjauan Historis Yuridias)*, Yogyakarta: Penerbitan Universitas Atma Jaya, 1998.

Isjwara. F. *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung: Office Angkasa, Bina Cipta 1990 cet- 3.

Kartodirdjo, Sartono, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: 1500-1900 dari Emperium Sampai Imperium*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1987.

Koirudin, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2004.

- Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan dan Ummah [majalah Dwimingguan] 1997.
- Lombard Denys, *Nusa Jawa: Silang Budaya; Jilid 1 Batas-batas Pembaratan, Jilid 2 Jaringan Asia, Jilid 3 Warisan Kerajaan – Kerajaan Konsentris*. Jakarta: PT SUN, 1996.
- MA. Shaban, *Sejarah Islam (Penafsiran Baru) 600–750*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada dan Badan penerbitan IAIN Walisongo Press Semarang, yang buku aslinya berjudul *Islamic History, A.D. 600-750* ; *A New Interpretation*. London ; Cambridge University Press, 1971.
- Maryam, Siti (ed), *Sejarah Peradaban Islam dari Masa Klasik hingga Modern*, Yogyakarta: Jurusan SPI Fakultas Adab IAIN Sunan Kalijaga dan LESFI, 2002.
- Mas'ood Mohtar dan Colin Mac Andrews, *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajahmada University Press, 2001.
- Moedjanto, G, *Kasultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman*, Yogyakarta: Kanisius [Anggota IKAPI], 1994.
- Najib, Mohammad, *Demokrasi dalam Perspektif Budaya Nusantara*, Yogyakarta : LKPSM, 1996.
- Nasution, Harun, *Islam di Tinjau dari Berbagai Aspeknya*, jilid I, Jakarta: UI Press, 1974.
- Noer Dalier, *Pemikiran Poiliik di Negeri Barat*, Bandung : Mizan, 1998.
- Nugroho, Heru (ed), *Interpretati Kritis Keistimewaan Yogyakarta*, Yogyakarta: Center For Critical Sosial Studies dan Forum Bulak Sumur School of Thought, 2002.
- Pemerintah Daerah Provinsi DIY, *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Pemda DIY, Yogyakarta, 1996.
- Poerwokoesoemo, Sudarisman, *Daerah Keistimewaan Yogyakarta*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1984.
- Razaki Abdur dan Titok Harianto (ed). *Membongkar Mitos Keistimewaan Yogyakarta*, Yogyakarta : IRE Press Yogyakarta, 2003.
- Ricklefs. M.C, *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991.

- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Konseptual dari Normatif KePemuknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Semarang: LSM Damar Semarang [Pustaka Pelajar Offset] 2004.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press 1993.
- Shadiqin Ali dkk, *Sejarah Peradaban Islam dari Masa Klasik hingga Modern*, Yogyakarta: Jurusan SPI fakultas Adab IAIN Sunan kalijaga Yogyakarta dan LESFI, 2002.
- Sorensen Georg, *Demokrasi Dan Demokratisasi: Proses dan Prospek Sebuah Dunia Yang Sedang Berubah*.Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Suaedy Ahmad (ed). *Pergaulan Pesantren dan Demokratisasi*, Yogyakarta: LKiS dan P3M Pact- INPI, 2000.
- Sudirja Harya & Sentanoe Kertonegoro, *Sejarah Perjuangan Yogyakarta dalam Kronologi Waktu (Historical Stugle of Yogyakarta In Cronologi of Time)*, Yayasan Guntur Madu, Jakarta,tt.
- Sudjatmo, *Daerah Istimewa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jakarta : PT Bina Aksara, 1988.
- Sumardjan Selo, *Perubahan Sosial di Yogyakarta*, Yogyakarta: Gajah Mada Press,1991.
- Surandjana, *Pemerintah Daerah di Berbagai Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997.
- Suseno Frans Magnis, dkk, *Agama dan Demokrasi*, Jakarta: P3M dan FNS, 1992.
- Suwarno, P.J, *Hamengkubuwono IX dan Sistem Birokrasi Pemerintah Yogyakarta 1924-1974*.Yogyakarta: Kanisius, 1994.
- Utomo, Warsito. *Dinamika Administrasi Publik; Analisis Empiris Seputar Isu- Isu Kontemporer dalam Administrasi Publik*. Yogyakarta: Kerjasama dengan Program Megister Administrasi Universitas Gajah Mada, 2003.
- Watt, W. Montgomery, (*Islamic Political Thought*), *Politik Islam dalam Lintas Sejarah*. Jakarta: P3M .1988.
- Wibawa, Somadra, *Negara-Negara Di Nusantara; Dari Negara Kota Hingga Negara Bangsa Dari Modernisasi Hingga Reformasi Administrasi*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001.

## Daftar Tarjamah

### Bab II

No.	Surat	Terjemah	Keterangan
01	Al-Hujarat (49) ;13 disebutkan	Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki – laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa–bangsa dan bersuku–suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu.	
02	Asy'Syura [42]; 38	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan tuhan nya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antar mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.	
03	Ali Imran [3];159	Maka disebabkan karena rahmat Allahlah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu, karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan (peperangan) itu.	

04	Al-Maidah [5]; 2	Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pekanggaran.	
5	An- Nisa' [4]; 58	Apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil	
6	Surah Al-Ana'am (6); 152	dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil kendatipundia adalah kerabatmu	
7	Surat Ar-Ra'd [13]; 11	sesungguhnya Allah tidak mengubah suatu keadaan kaum, sehingga mereka mengubah keadaan mereka sendiri.	

  
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
 SUNAN KALIJAGA  
 YOGYAKARTA

## Dasar-Dasar Terbentuknya Daerah Keistimewaan Yogyakarta.

### **Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945,**

Oleh karena Negara Indonesia itu suatu *eenheidsstaat*, maka Indonesia akan mempunyai daerah di dalam lingkungannya yang bersifat *Staat* juga.

Daerah akan dibagi dalam daerah Propinsi dan daerah Propinsi dibagi dalam daerah yang lebih kecil.

Di daerah yang bersifat otonom (*streek locale rechtgemeenschapped*) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang.

Di Daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan Daerah, oleh karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan.

- I. Dalam teritorir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *Zelfbesturendelandscappen* dan *Volksgemeenschappen*, seperti di desa Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli. Dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah bersifat istimewa.

Negara Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa tersebut dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan mengingati hak-hak asal usul daerah tersebut.

### **UU No. 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah pasal 18 ayat (5) dan (6), yang berbunyi:**

-Pasal 18 ayat (5): Kepala Daerah Istimewa diangkat oleh Presiden dari keturunan keluarga yang berkuasa di zaman sebelum RI dan yang menguasai daerahnya, dengan syarat-syarat kecakapan, kejujuran dan kesetiaan dengan mengingat adat istiadat daerah itu.

-Pasal 18 ayat (6): untuk Daerah Istimewa dapat diangkat seorang Wakil Kepala Daerah oleh Presiden dengan mengingat syarat-syarat pada pasal (5) ini. Wakil Kepala Daerah Istimewa adalah dari Dewan Pemerintah Daerah.

### **UU No 3 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta.**

#### **Pasal 1**

- (1) Daerah yang meliputi Daerah Kasultanan Yogyakarta dan Daerah Paku Alaman Ditetapkan menjadi Daerah Istimewa Yogyakarta.



(2) Daerah Istimewa Yogyakarta adalah setingkat dengan Propinsi.

**UU No 1 tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Pasal 25 ayat (1).**

Kepala Daerah Istimewa diangkat dan diberhentikan oleh Presiden bagi daerah istimewa tingkat I dan Mendagri bagi daerah istimewa tingkat II dan tingkat III. Kepala Daerah Istimewa diangkat dari calon yang diajukan DPRD dari keturunan yang berkuasa di daerah situ.

**UU No 5 Tahun 1974 Tentang pokok-pokok pemerintahan Daerah. Pasal 91.**

Butir (b): Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta yang sekarang adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, yang tidak terikat kepada masa jabatan, syarat dan cara pengangkatan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah lainnya.

**UU No 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, pasal 122.**

Keistimewaan untuk Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai mana dimaksud dalam UU No 5 tahun 1974 adalah tetap dengan ketentuan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Propinsi Istimewa Aceh dan Propinsi Istimewa Yogyakarta didasarkan pada Undang-Undang ini.

**UU No.32 tahun 2004 Pemerintahan Daerah, pasal 226, ayat (2)**

(2) Keistimewaan untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, adalah tetap dengan ketentuan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta didasarkan pada Undang-Undang ini.

**Sumber:** UUD 1945

: A Im'an Sukri dkk (penyusun)

*Masa Depan Yogyakarta Dalam Bingkai Keistimewaan.* Mengutip dari  
Ir. Sujanto (1998)

*Daerah Istimewa Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

Undang-Undang Otonomi 1999.

[www.ireyogya.org/diskusi/messages/462.html](http://www.ireyogya.org/diskusi/messages/462.html) - 101k - Cached - Similar pages

**Tabel perolehan Suara Parpol pada Pemilu 1999 DIY.**

<b>PARTAI</b>	<b>JUMLAH PEMILIH</b>	<b>PROSENTASE</b>
PDIP	637.697	35,53
PAN	301,701	16,81
PKB	260,326	14,50
GOLKAR	256,726	14,30
PPP	90,267	5,03
PK	29,267	1,66
PBB	25,539	1,42
Lain-lain	236,274	12,17.
<b>Jumlah</b>	<b>1.838.405.</b>	<b>100,00</b>

Sumber: *Renstra Pemprop DIY 2001,*

*Dikutip dari I Im'an Sukri, Masa Depan Yogyakarta Dalam Bingkai Keistimewaan.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **BIODATA ULAMA'**

### **ABU HASAN AL-MAWARDI.**

Nama lengkap ilmuwan Islam ini adalah Abu Hasan Ali bin Habib al- Mawardi al-Bashri, hidup antara tahun 364 H atau 975 M dan 450 H atau 1059. Abu Hasan adalah seorang pemikir Islam yang terkenal, tokoh terkemuka mazhab Syafi'i dan pejabat tinggi yang besar pengaruhnya pada zaman Abbasyiah, dia adalah seorang hakim terkenal. Selain itu dia adalah seorang penulis yang terkenal. cukup banyak karya yang telah dikeluarkan. Berbagai macam cabang ilmu pengetahuan, diantaranya adalah ilmu bahasa, sastra, tafsir Fiqih dan ketatanegaraan. Salah satu bukunya yang paling terkenal adalah Adab al-Duniya wa al-Din (tata krama kehidupan Duniawi dan Agamawi), al-Ahkam al-Sulthaniyah (Peraturan-peraturan Kerajaan/pemerintahan). Satu yang paling menarik adalah dia telah memperkenalkan teori kontrak sosial pada awal abad XI Masehi.

### **SAYYID M. RASYID RIDLA.**

Ridla dilahirkan tahun 1865 di kota Tripoli yang terletak di sebelah utara Bairut, Libanon, yang sebelum Perang Dunia I masuk wilayah Suria. Ia keturunan Husaen bin Ali bin Abi Thalib. Dia mulai pendidikan formalnya di Madrasah Rosyidiyyah di Tripoli. Kemudian tahun 1883 memasuki Madrasah Wathaniyah Islamiyah di Bairut di bawah pimpinan Hassan Jassar. Sekitar tahun 1886 dia lulus dan mulailah dia menulis dan menghadiri ceramah-ceramah agama. Dia mendirikan penerbitan majalah dan tafsir al-Qur'an untuk pembaharuan Islam yang diberi nama al-Manar, di bawah pengasuhan Abduh dan Ridla.

### **IBNU KALDUN**

Nama dan silsilah lengkap Ibnu Khaldun adalah Abd al-Rahman bin Muhammad bin Mohamad bin Hasan bin Jabir bin Mohammad bin Ibrahim bin Abd al-Rahman bin Khaldun. Dia dilahirkan di Tunisia, Afrika Utara, pada tahun 732 H atau 1332 M, dari keluarga pendatang dari Andalusia, Spanyol selatan dan pindah ke Tunisia pada pertengahan Abad VII H. Ibnu Kaldun meniti karirnya dalam bidang pemerintahan dan politik di kawasan Afrika Barat Laut dan Andalusia selama hampir seperempat abad. Akhir dari karirnya Ibnu Kaldun dipecat dan masuk dalam penjara karena terbongkarnya rahasia kalau dia berkomplot dengan satu politik, bani yang menjadi penguasa sebelumnya.

## BIODATA PRIBADI

Nama : Wardatuzahro  
Nama Panggilan : Wardah / Zahra  
Nama Populer : Pu2t Mardika  
Tempat & Tgl Lahir : Jepara, 17 Juni 1982  
Nama Bapak : Ah Zuhri Muhadi  
Nama Ibu : Muslimah

### PENDIDIKAN

- **SD** : MI Al-Husain Watuaji Keling Jepara.
- **SLTP** : MTs Assalafiyah Kajen Margoyoso Pati.
- **SLTA** : Madrasah Aliyah Assalafiyah Kajen Margoyoso Pati.
- **PT** : Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

### PENGALAMAN ORGANISASI

- Pemimpin Umum Bulletin Perempuan Yogyakarta tahun 2001-2003.
- Bendahara Partai Solidaritas IAIN tahun 2001-2002
- Bendahara Panitia Ospek Institut tahun 2002
- Devisi Produksi UKM JCM tahun 2003.